

ANALISIS INKLUSIVITAS KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2021Q1-2023Q4

Muhammad Rizki Toli¹, Mauna Th. B. Maramis², Irawaty Masloman³

Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia^{1,2,3}

Email: mrizkytoli@gmail.com

Keywords

Financial Inclusion, Sharia Banking, Index of Financial Inclusion, Accessibility, Availability, Usage.

Abstrak

This study aims to analyze the level of financial inclusivity in the Islamic banking sector in Indonesia during the period 2021Q1–2023Q4 using the Index of Financial Inclusion (IFI) method. The data used includes the amount of third-party funds (DPK) of Islamic banking, the number of Islamic banking service offices, the number of population, the amount of financing, and the Gross Regional Domestic Product (GDP) per quarter. The data was obtained from the Sharia Banking Statistical Report released by the Financial Services Authority (OJK), the Indonesian Statistical Report, and the Provincial GDP Report. The results of the study show that the average accessibility dimension has a relatively low value of 0.07, with an average actual value of IDR 1,890,000,000 per 1,000 residents. The availability dimension is also low with an average index of 0.05, indicating that only one unit of Islamic banking service office is available for every 100,000 residents. Meanwhile, the utilization dimension recorded an index of 0.13 which was also low, although the average actual value reached Rp137.7 billion in the form of financing. Nanggroe Aceh Darussalam Province (NAD) stands out with a usage index of 0.92 and an average financing of Rp944.95 billion, showing a high level of Islamic financial inclusion. This research underscores the importance of increasing financial literacy, expanding service networks, and digital innovation in encouraging more equitable Islamic financial inclusivity in Indonesia.

Inklusi Keuangan, Perbankan Syariah, Index of Financial Inclusion, Aksesibilitas, Availabilitas, Penggunaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inklusivitas keuangan pada sektor perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021Q1–2023Q4 dengan menggunakan metode Index of Financial Inclusion (IFI). Data yang digunakan meliputi jumlah dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah, jumlah kantor layanan perbankan syariah, jumlah penduduk, jumlah pembiayaan, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kuartal. Data-data tersebut diperoleh dari Laporan Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Statistik Indonesia, dan Laporan PDRB Provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dimensi aksesibilitas memiliki nilai 0,07 yang tergolong rendah, dengan nilai aktual rata-rata sebesar Rp1.890.000.000 per 1.000 penduduk. Dimensi availabilitas juga rendah dengan indeks rata-rata 0,05, menunjukkan hanya satu unit kantor layanan perbankan syariah tersedia untuk setiap 100.000 penduduk. Sementara itu, dimensi penggunaan mencatat indeks 0,13 yang juga rendah, meskipun rata-rata nilai aktual mencapai Rp137,7 miliar dalam bentuk pembiayaan. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menonjol dengan indeks penggunaan mencapai 0,92 dan rata-rata pembiayaan sebesar Rp944,95 miliar, menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah yang tinggi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan literasi keuangan, perluasan jaringan layanan, serta inovasi digital dalam mendorong inklusivitas keuangan syariah yang lebih merata di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

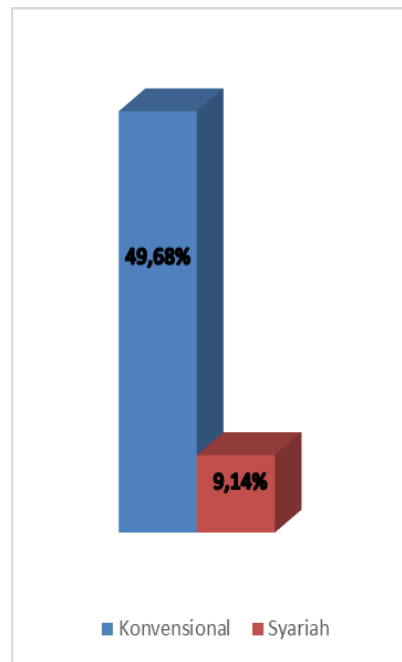
Indonesia menjadi negara yang berkembang yang memiliki mata uang nasional bernama Rupiah yang bersimbolkan Rp/IDR. Indonesia memiliki sistem mata uang nasional yang menyediakan layanan terkait pertukaran dan, di sisi lain, berfungsi sebagai perantara penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian mata uang nasional yang stabil untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemajuan pembangunan diukur dengan munculnya sistem keuangan stabil yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Akses keuangan yang memadai tidak selalu dibarengi dengan pesatnya perkembangan industri keuangan. Sebenarnya, memiliki akses terhadap layanan sangat penting bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam sistem perekonomian adalah keuangan. Sejauh mana masyarakat dapat menggunakan dan mengakses layanan keuangan, menunjukkan tingkat inklusi keuangan dalam perekonomian.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dimana 87,18% masyarakatnya beragama Islam (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Fakta ini diharapkan dapat memudahkan keberhasilan penerapan sistem keuangan syariah atau sistem keuangan nasional yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan keunikannya, sistem keuangan syariah sebagai salah satu komponen sistem keuangan nasional mempunyai banyak potensi dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Sulit bagi sistem keuangan dan sektor keuangan Islam secara keseluruhan untuk memenuhi perannya masing-masing.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei tiga tahunan di seluruh tanah air untuk memetakan situasi tingkat lokal, literasi keuangan, dan inklusi sosial di Indonesia. Sebagaimana komitmen untuk terus mendorong industri jasa keuangan syariah di Indonesia, dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih jauh dari yang tertinggi.

Grafik 1. Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2022

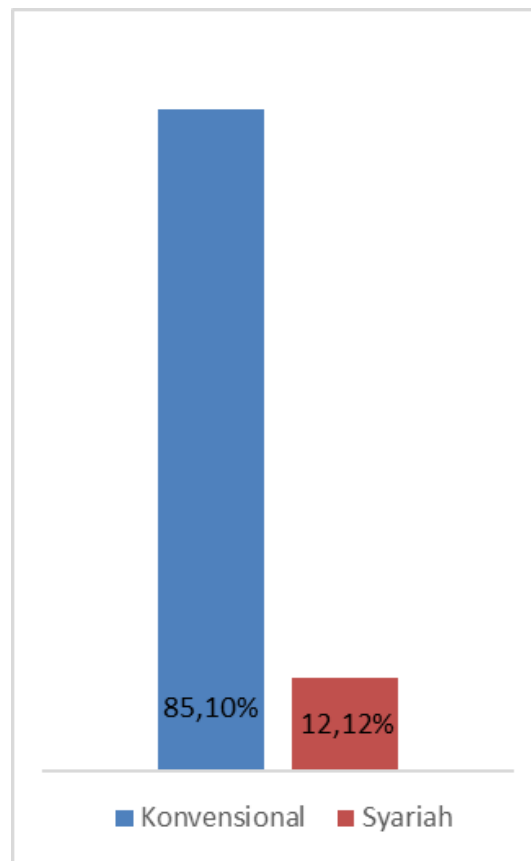


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Survei Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2022 diatas, terlihat bahwa literasi penduduk Indonesia atas keuangan syariah masih jauh berbeda dengan literasi penduduk Indonesia atas keuangan konvensional. Berdasarkan grafik tersebut, berarti dari setiap 100 penduduk di Indonesia, hanya terdapat 9 orang yang *well literate* mengenai keuangan syariah.

Kurangnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah ini berarti masih rendahnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah dan hal ini akan mempengaruhi peran dari keuangan syariah di Indonesia.

Grafik 2 Indeks Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2022 tersebut, tingkat inklusi keuangan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan konvensional. Dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang sangat rendah, artinya masih ada ruang untuk upaya meningkatkan literasi kepada masyarakat tentang layanan jasa keuangan syariah di Indonesia. Khususnya di sektor perbankan syariah yang secara sektoral memiliki indeks literasi tertinggi dalam industri keuangan syariah lainnya, yaitu sebesar 12,12% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) artinya dibandingkan dengan layanan keuangan syariah lainnya (seperti sektor perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dll) sektor perbankan lebih umum diketahui masyarakat Indonesia. Tapi dengan fakta ini, layanan keuangan syariah sektor perbankan belum bisa menjadi sektor keuangan yang bisa mencakup segala keperluan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia diketahui bahwa terdapat 3 jenis layanan keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS). Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa dari 3 jenis layanan keuangan syariah sektor perbankan, jenis BPRS memiliki *market share* terendah yaitu 2,51% dari total perbankan syariah, dibandingkan dengan BUS (66,30%) dan UUS (31,19%) (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2022). Hal ini berarti dari 3 jenis layanan keuangan syariah sektor perbankan tersebut, masyarakat Indonesia cenderung menggunakan layanan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga 2 jenis layanan sektor perbankan syariah ini menjadi fokus pembahasan pengukuran indeks inklusi keuangan syariah dalam penelitian ini. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah di penelitian ini yaitu : Bagaimana perkembangan dimensi aksesibilitas keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia Periode 2021Q1-2023Q4? Bagaimana perkembangan dimensi availabilitas keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia Periode 2021Q1-2023Q4? Bagaimana perkembangan dimensi penggunaan keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia Periode 2021Q1-2023Q4? Bagaimana kebijakan inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia Periode 2021Q1-2023Q4?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. (Agustin, 2021).

Menurut Sutan Reny Sjahdeiny, bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana – dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Sjahdeiny, 2007)

Inklusifitas Keuangan

Keuangan inklusif atau *financial inclusion* bersinonim dengan frasa *inclusive financial system*, yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, non eksklusif. Inklusivitas keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan,

tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpenghasilan rendah atau miskin (Wahid, 2014).

Sarma (2012) menjelaskan bahwa *financial inclusion is a process that ensures the ease of access, availability and usage of the formal financial system for all members of an economy*. Definisi ini menekankan beberapa dimensi inklusi keuangan, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal. Dimensi ini bersama-sama membangun inklusif sistem keuangan. Karena bank adalah pintu gerbang ke bentuk layanan keuangan yang paling dasar, inklusi/eksklusi perbankan sering digunakan sebagai analog dengan inklusi/eksklusi keuangan. Demikian pula, dalam makalah ini, kami menganggap inklusi perbankan sebagai analog dengan inklusi keuangan.

Indeks Inklusi Keuangan

Dalam literatur seperti pada Sarma (2012), Umar (2017), dan Puspitasari, Mahri, dan Utami (2020) menggunakan indikator atau dimensi pengukuran pada metode perhitungan *Index Financial Inclusion* (IFI) berupa aksesibilitas (*penetration*), availabilitas (*availability*) dan penggunaan jasa perbankan (*usage of banking services*).

A) Dimensi Aksesibilitas

Sistem keuangan inklusif harus mempunyai pengguna sebanyak mungkin; Artinya, pengguna harus dapat menukar uang secara transparan satu sama lain. Orang dengan rekening bank lebih cenderung menjadi pemegang tingkat penetrasi bank. Jadi, jika setiap individu dalam ekonomi tertentu memiliki rekening bank, maka angka ini adalah 1. Jumlah rekening bank simpanan per orang dewasa dan proporsi orang dewasa yang memiliki rekening bank dapat diharapkan berkorelasi positif dan hal itu dapat membenarkan penggunaan jumlah rekening simpanan per 1000 orang dewasa sebagai proksi untuk jumlah orang dewasa yang menyimpan uang (Sarma, 2012). Perhitungan dalam pengukuran dimensi ini (D_1) diwakili rasio jumlah DPK perbankan syariah dalam jutaan rupiah per 1.000 penduduk (Umar, 2017). Hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$D_1 = \frac{\text{Jumlah DPK Tahun-t}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun-t}} \times 1.000$$

B) Dimensi Availabilitas

Dalam Sarma (2012) sistem keuangan yang inklusif memiliki layanan perbankan harus mudah tersedia bagi pengguna. Indikator availabilitas adalah outlet perbankan (kantor, cabang, ATM dan sebagainya). Dengan cara ini, ketersediaan layanan dapat

diukur berdasarkan jumlah cabang bank (per 1000 pelanggan) dan / atau ATM per 1000 orang. ATM sangat penting dalam sistem perbankan saat ini di banyak negara. Selain menyediakan rekening bank bagi pelanggan dan memfasilitasi transaksi yang melibatkan uang tunai dan cek (layanan teller tradisional), ATM juga dapat melakukan fungsi lain, seperti menyediakan layanan pembayaran kartu kredit dan kartu debit. Oleh karena itu, ATM sangat penting dalam memberikan peningkatan akses terhadap layanan bank yang tidak dapat diabaikan.

Namun, penyebaran jaringan ATM bervariasi dari satu bank ke bank lain, serta dari satu negara ke negara lain, dan peran cabang bank tetap ada. Oleh karena itu, keduanya termasuk dalam indeks ini. Jumlah pegawai bank per nasabah juga dapat digunakan sebagai indikator ketersediaan layanan perbankan. Dalam Umar (2017) indeks ini menggunakan data jumlah kantor layanan (cabang bank dan jumlah ATM) per 100.000 orang dewasa untuk mengukur dimensi availabilitas :

$$D_2 = \frac{\text{Jumlah Kantor Layanan Tahun-t}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun-t}} \times 100.000$$

C) Dimensi Penggunaan

Dimensi ini merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sekaligus mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, meliputi: keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. Penggunaan (D_3) yaitu dimensi untuk mengukur sejauh mana penggunaan jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa pembiayaan (*financing*) (Sarma, 2012).

Dalam Umar (2017) dimensi penggunaan adalah rasio jumlah pembiayaan (financing) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dalam milyar rupiah dihitung dengan rumus:

$$D_3 = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Tahun-t}}{\text{Nilai PDRB Tahun-t}} \times 1.000$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Limbanadi, Kumaat dan Mandeij (2023) dengan judul penelitian Kajian Pencapaian Indeks Inklusi Keuangan Syariah Sektor Perbankan di Indonesia Tahun 2018-2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar capaian dimensi aksesibilitas, availabilitas, penggunaan, dan strategi inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan

metode analisis deskriptif kuantitatif artinya masing-masing sehingga hasil berbentuk angka tersebut akan ditafsirkan dinarasikan dalam bentuk paragraf. Metode ini digunakan karena menyajikan pengukuran komprehensif yang robust dan dapat dibandingkan antar provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan capaian indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tahun 2018-2021 ditinjau dari : (1) Dimensi Aksesibilitas yang menunjukkan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia bernilai 0,06 yang tergolong rendah dengan nilai aktual rata-rata mencapai 1,45; (2) Dimensi Availabilitas yang menunjukkan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia mencapai 0,13 yang termasuk rendah dengan nilai aktual rata-rata mencapai 0.94; (3) Dimensi Penggunaan yang menunjukkan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia mencapai 0,12 yang termasuk rendah dengan rata-rata nilai aktual mencapai 27,78.

Penelitian oleh Maengkom, Rotinsulu dan Mandeij (2022) dengan judul penelitian *Analisis Pengaruh Suku Bunga Acuan, Kecenderungan Konsumsi Masyarakat Dan Inklusivitas Keuangan Terhadap Permintaan Uang Elektronik Di Indonesia Periode 2011.1-2020.4*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak acuan tingkat suku bunga acuan, kecenderungan konsumsi masyarakat, dan inklusivitas keuangan terhadap permintaan uang elektronik di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda (OLS) dengan data time series yang mencakup periode tiga tahun dari 2011 hingga 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga acuan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap permintaan uang elektronik. Peningkatan konsumsi massal berdampak positif dan signifikan terhadap permintaan uang elektronik, sedangkan nilai uang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan uang elektronik.

Penelitian oleh Annisa, Setyadi dan Arifin (2019) dengan judul penelitian *Faktor - Faktor Penentu Inklusi Keuangan Di Indonesia Periode Tahun 2012 - 2016*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, *gross domestic product* (GDP) perkapita, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan *non performing loan* (NPL) terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dengan indikator 33 provinsi selama periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap inklusi keuangan, GDP perkapita berpengaruh terhadap inklusi keuangan dan NPL

berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode tahun 2012-2016. Namun, UMKM tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode 2012-2016

Penelitian oleh Nengsih (2023) dengan judul penelitian *Strategi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi yang digunakan perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor riil, penguatan pembiayaan mikro, mengembangkan program kemitraan melalui dana zakat, infak, sedekah, qardh al-hasan, dan dana sosial lainnya, serta mengembangkan linkage progame dengan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Penelitian oleh Oktavia (2023) dengan judul penelitian *Strategi Bank syariah Indonesia Meningkatkan Inklusi Keuangan*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang khususnya di BSI KC Malang Soetta dan BSI KC Malang Sutoyo dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti yaitu BSI KC Malang Soetta dan BSI KC Malang Sutoyo menggunakan BSI Mobile untuk memudahkan nasabah dalam pengaksesan layanan keuangan jarak jauh. Dalam mengenalkan program dan layanan pada BSI Mobile, BSI melakukan sosialisasi BSI Mobile dengan menggelar acara Mata Najwa On Stage yang dipelopori oleh jurnalis ternama Najwa Shihab.

Penelitian ini mengkaji tentang indeks inklusi keuangan syariah pada sektor perbankan di Indonesia selama tahun 2021Q1-2023Q4. Selanjutnya, indeks keuangan sektor perbankan dibagi menjadi tiga dimensi: aksesibilitas, availabilitas, dan Penggunaan. Setelah itu, nilai puncak indeks sektor keuangan syariah di industri perbankan terkait dengan strategi sektor keuangan syariah Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis inklusivitas keuangan pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode

dokumentasi dari Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK, Laporan Statistik Indonesia, serta Laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari BPS untuk periode 2021Q1–2023Q4. Variabel penelitian meliputi tiga dimensi inklusivitas keuangan: (1) aksesibilitas, diukur dengan rasio jumlah DPK perbankan syariah per 1.000 penduduk, (2) availabilitas, diukur dengan rasio jumlah kantor layanan bank syariah per 100.000 penduduk, dan (3) penggunaan, diukur dengan rasio volume pembiayaan terhadap nilai PDRB per 1.000 penduduk. Perhitungan indeks inklusivitas menggunakan pendekatan Index of Financial Inclusion (IFI) dari Sarma (2012). Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai aktual setiap dimensi menggunakan formula rasio yang telah ditetapkan, kemudian menormalisasi nilai indeks berdasarkan batas tertinggi dan terendah masing-masing dimensi. Hasil perhitungan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat inklusivitas keuangan perbankan syariah di berbagai provinsi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Dimensi Aksesibilitas

Dimensi pertama dari inklusi keuangan adalah dimensi aksesibilitas perbankan syariah yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan syariah. Pada dimensi ini menggunakan indikator rasio DPK pada perbankan syariah BUS dan UUS terhadap jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2021-2023.

Berikut ini adalah tabel yang berisikan rata-rata nilai aktual dengan satuan miliar rupiah (D), nilai indeks dimensi (d), dan kategori dimensi aksesibilitas setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021Q1-2023Q4:

Tabel 1. Rata-rata Nilai Aktual (D) dan Nilai Indeks (d) Dimensi Aksesibilitas

Provinsi	(D) <i>miliar rupiah</i>	(d)	Kategori
DKI Jakarta	23,26	0,87	Tinggi
Nanggroe Aceh Darussalam	7,20	0,27	Rendah
Kalimantan Timur	3,08	0,11	Rendah
DI Yogyakarta	2,49	0,09	Rendah
Nusa Tenggara Barat	2,73	0,10	Rendah
Kalimantan Selatan	2,12	0,08	Rendah

Kepulauan Riau	2,12	0,08	Rendah
Riau	1,82	0,07	Rendah
Banten	1,85	0,07	Rendah
Sumatera Utara	1,38	0,05	Rendah
Sumatera Barat	1,25	0,05	Rendah
Jawa Barat	1,02	0,04	Rendah
Sumatera Selatan	1,15	0,04	Rendah
Jawa Timur	1,01	0,04	Rendah
Sulawesi Selatan	1,12	0,04	Rendah
Bangka Belitung	0,89	0,03	Rendah
Jambi	0,88	0,03	Rendah
Jawa Tengah	0,68	0,03	Rendah
Kalimantan Barat	0,72	0,03	Rendah
Bengkulu	0,71	0,03	Rendah
Maluku Utara	0,73	0,03	Rendah
Sulawesi Tenggara	0,60	0,02	Rendah
Papua Barat	0,49	0,02	Rendah
Sulawesi Tengah	0,44	0,02	Rendah
Kalimantan Tengah	0,42	0,02	Rendah
Lampung	0,41	0,02	Rendah
Bali	0,51	0,02	Rendah
Maluku	0,29	0,01	Rendah
Gorontalo	0,28	0,01	Rendah
Sulawesi Barat	0,24	0,01	Rendah
Papua	0,40	0,01	Rendah
Sulawesi Utara	0,16	0,01	Rendah
Nusa Tenggara Timur	0,03	0,00	Rendah
Rata-rata	1,89	0,07	Rendah

Sumber: Hasil Olahan Data

Ditemukan bahwa rata-rata dimensi aksesibilitas indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2021Q1-2023Q4 bernilai 0.07 yang artinya termasuk kategori rendah. Indonesia memiliki rata-rata nilai aktual dimensi

aksesibilitas 1,89 yang artinya secara keseluruhan Indonesia memiliki jumlah rata-rata dana pihak ketiga mencapai Rp1.890.000.000, - per 1.000 penduduk Indonesia, atau Rp1.890.000, - setiap penduduk Indonesia.

Adapun provinsi yang termasuk kategori tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan nilai aktual dimensi aksesibilitas yang paling besar. Dimana rata-rata nilai aktual dimensi aksesibilitas mencapai 23,26 Jumlah rata-rata dana pihak ketiga di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp23.260.000.000, - per 1.000 penduduk, atau Rp23.260.000, - setiap penduduk provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021Q1-2023Q4.

Kemudian terdapat 32 provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori rendah. Provinsi dengan dimensi aksesibilitas perbankan yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Secara rata-rata rasio dana pihak ketiga yang dihimpun tahun 2021Q1-2023Q4 perbankan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih rendah yaitu Rp30.000.000, - per 1.000 penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Rp30.000, - per penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2021Q1-2023Q4. Sedangkan pada Provinsi Sulawesi Utara mampu menghimpun rata-rata DPK perbankan syariah adalah Rp160.000.000, - per 1.000 penduduk atau Rp160.000, - per penduduk Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2021Q1-2023Q4.

B. Dimensi Availabilitas

Dimensi kedua dari inklusi keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan. Berikut adalah tabel yang berisikan nilai aktual rata-rata (D), nilai indeks dimensi (d), dan kategori dimensi availabilitas setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021Q1-2023Q4:

Tabel 2. Rata-rata Nilai Aktual (D) dan Nilai Indeks (d) Dimensi Availabilitas

Provinsi	(D) unit	(d)	Kategori
Nanggroe Aceh Darussalam	6,44	0,29	Rendah
DKI Jakarta	2,61	0,12	Rendah
Kalimantan Timur	2,42	0,11	Rendah
DI Yogyakarta	2,29	0,10	Rendah
Nusa Tenggara Barat	1,81	0,08	Rendah
Kepulauan Riau	1,72	0,08	Rendah
Kalimantan Selatan	1,48	0,07	Rendah
Sumatera Barat	1,31	0,06	Rendah

Riau	1,18	0,05	Rendah
Bengkulu	0,96	0,04	Rendah
Jambi	0,90	0,04	Rendah
Banten	0,82	0,04	Rendah
Sumatera Selatan	0,76	0,03	Rendah
Sulawesi Selatan	0,70	0,03	Rendah
Sumatera Utara	0,69	0,03	Rendah
Maluku Utara	0,67	0,03	Rendah
Jawa Barat	0,67	0,03	Rendah
Sulawesi Tenggara	0,65	0,03	Rendah
Kalimantan Barat	0,63	0,03	Rendah
Jawa Timur	0,60	0,03	Rendah
Bangka Belitung	0,58	0,03	Rendah
Sulawesi Tengah	0,57	0,03	Rendah
Jawa Tengah	0,54	0,02	Rendah
Gorontalo	0,48	0,02	Rendah
Lampung	0,47	0,02	Rendah
Bali	0,47	0,02	Rendah
Kalimantan Tengah	0,47	0,02	Rendah
Papua Barat	0,41	0,02	Rendah
Sulawesi Barat	0,39	0,02	Rendah
Sulawesi Utara	0,29	0,01	Rendah
Maluku	0,28	0,01	Rendah
Papua	0,19	0,01	Rendah
Nusa Tenggara Timur	0,10	0,00	Rendah
Rata-rata	1,05	0,05	Rendah

Sumber: Hasil Olahan Data

Ditemukan bahwa rata-rata nilai dimensi availabilitas inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 20221Q1-2024Q4 mencapai 0,05 yang termasuk kategori rendah dengan nilai aktual rata-rata mencapai 1,05 yang artinya Indonesia memiliki 1 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 100.000 penduduk

atau 10 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 1.000.000 penduduk pada tahun 2021Q1-2023Q4.

Adapun dari tabel diatas ditemukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tercatat termasuk kategori rendah dengan rata-rata jumlah kantor layanan 6 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 100.000 penduduk atau 60 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 1.000.000 penduduk pada tahun 2021Q1-2023Q4 sehingga nilai dimensi avalabilitasnya rendah. Hal ini juga terjadi karena jumlah kantor layanan perbankan syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami penurunan selama periode 2021Q1-2023Q4.

Selanjutnya Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori rendah dengan rata-rata jumlah kantor layanan 3 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 100.000 penduduk atau 30 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 1.000.000 penduduk pada tahun 2021Q1-2023Q4. Hal ini juga terjadi karena jumlah kantor layanan perbankan syariah di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan selama periode 2021Q1-2023Q4.

Kemudian Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki rata-rata 2 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 100.000 penduduk atau 20 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 1.000.000 penduduk selama periode 2021Q1-2023Q4. Ada juga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rata-rata memiliki 1 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 1.000.000 penduduk selama periode 2021Q1-2023Q4, sehingga Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori paling rendah. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori rendah dengan rata-rata 1 unit kantor layanan perbankan syariah setiap melayani 1.000.000 penduduk selama periode 2021Q1-2023Q4.

Sebaran kantor layanan perbankan syariah yang rendah di Indonesia justru memperlambat kinerja layanan jasa perbankan syariah di Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja layanan jasa perbankan syariah di Indonesia, perlu ditingkatkan penyebaran kantor layanan perbankan syariah diseluruh daerah di Indonesia. Keberadaan jasa perbankan syariah merupakan hal penting dalam peningkatan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan dimensi avalabilitas di Indonesia.

C. Dimensi Penggunaan

Berikut dibawah ini adalah tabel yang berisikan nilai aktual rata-rata dengan satuan miliar rupiah (D), nilai indeks dimensi (d), dan kategori dimensi penggunaan setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021Q1-2023Q4:

Tabel 3. Rata-rata Nilai Aktual (D) dan Nilai Indeks (d) Dimensi Penggunaan

Provinsi	(D) <i>miliar rupiah</i>	(d)	Kategori
Nanggroe Aceh Darussalam	944,95	0,92	Tinggi
Nusa Tenggara Barat	491,93	0,48	Medium
DKI Jakarta	374,06	0,37	Medium
DI Yogyakarta	189,88	0,19	Medium
Kalimantan Barat	179,22	0,18	Rendah
Kalimantan Selatan	166,65	0,16	Rendah
Bengkulu	154,88	0,15	Rendah
Kepulauan Riau	145,04	0,14	Rendah
Sumatera Barat	139,45	0,14	Rendah
Jawa Barat	127,26	0,12	Rendah
Sumatera Selatan	124,78	0,12	Rendah
Banten	122,47	0,12	Rendah
Sumatera Utara	118,36	0,12	Rendah
Sulawesi Selatan	107,90	0,11	Rendah
Jambi	107,48	0,10	Rendah
Jawa Tengah	104,44	0,10	Rendah
Jawa Timur	84,63	0,08	Rendah
Maluku Utara	79,79	0,08	Rendah
Riau	79,31	0,08	Rendah
Sulawesi Tenggara	76,84	0,08	Rendah
Sulawesi Barat	75,41	0,07	Rendah
Kalimantan Tengah	74,27	0,07	Rendah
Lampung	65,97	0,06	Rendah
Bangka Belitung	62,45	0,06	Rendah
Bali	62,04	0,06	Rendah

Sulawesi Tengah	56,99	0,06	Rendah
Kalimantan Timur	56,22	0,05	Rendah
Gorontalo	50,54	0,05	Rendah
Sulawesi Utara	44,26	0,04	Rendah
Maluku	42,06	0,04	Rendah
Papua	14,44	0,01	Rendah
Nusa Tenggara Timur	11,75	0,01	Rendah
Papua Barat	9,14	0,01	Rendah
Rata-rata	137,72	0,13	Rendah

Sumber; Hasil Olahan Data

menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks inklusi keuangan syariah dimensi penggunaan di Indonesia hanya mencapai 0,13 yang artinya termasuk kategori rendah. Tabel diatas juga menunjukkan rata-rata nilai aktual dimensi penggunaan mencapai 137,72 yang artinya rata-rata kemampuan penggunaan produk keuangan syariah sektor perbankan berupa pembiayaan mencapai Rp137.700.000.000,-. Adapun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikategorikan tinggi dengan nilai indeks inklusi keuangan sektor perbankan dimensi penggunaan mencapai 0,92 dengan nilai rata-rata aktual mencapai 944,95 yang artinya rata-rata kemampuan penggunaan produk keuangan syariah sektor perbankan berupa pembiayaan dengan jumlah Rp944.950.000.000,-.

Dalam kategori medium, terdapat 3 provinsi di Indonesia selama tahun 2021Q1-2023Q4. Pertama ialah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai indeks inklusi keuangan syariah dimensi penggunaan mencapai 0,48 dengan nilai rata-rata aktual mencapai 491,93 yang artinya rata-rata kemampuan penggunaan produk keuangan syariah sektor perbankan berupa pembiayaan dengan jumlah Rp491.930.000.000,-. Sedangkan pada Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai indeks inklusi keuangan syariah dimensi penggunaan mencapai 0,19 dengan nilai rata-rata aktual mencapai 189,88 yang artinya rata-rata kemampuan penggunaan produk syariah sektor perbankan berupa pembiayaan dengan jumlah Rp189.880.000.00,-.

Kemudian dalam kategori rendah, terdapat 30 provinsi di Indonesia dengan Provinsi Papua Barat diposisi kategori paling rendah. Provinsi Papua Barat memiliki nilai indeks inklusi keuangan syariah dimensi penggunaan hanya mencapai 0,01 dengan nilai rata-rata aktual mencapai 9,14 yang artinya rata-rata kemampuan penggunaan

produk keuangan syariah sektor perbankan berupa pembiayaan dengan jumlah Rp9.140.000.000,- selama tahun 2021Q1-2023Q4.

Tabel 4 Indeks Inklusi Keuangan Syariah Sektor Perbankan di Indonesia Tahun 2021Q1 – 2023Q4

	TAHUN												Rata-rata	Kategori
	2021				2022				2023					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Aceh	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	Tinggi
Jakarta	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	Medium
Nusa Tenggara Barat	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Rendah
Kepulauan Riau	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	Rendah
D.I Yogyakarta	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	Rendah
Riau	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Rendah
Kalimantan Timur	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	Rendah
Kalimantan Selatan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	Rendah
Bengkulu	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	Rendah
Sumatera Barat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Kalimantan Barat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Banten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Sumatera Selatan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Jawa Barat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Jambi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Sumatera Utara	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Sulawesi Selatan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Maluku Utara	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Jawa Timur	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Bangka Belitung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Sulawesi Tenggara	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Jawa Tengah	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Sulawesi Barat	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Gorontalo	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Rendah
Sulawesi Tengah	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	Rendah
Lampung	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	Rendah
Bali	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	Rendah
Kalimantan Tengah	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Rendah
Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	Rendah
Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Rendah
Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Rendah
Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	Rendah
Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Rendah
Rata-rata													0,1	Rendah

Sumber; Hasil Olahan Data

Secara keseluruhan, dari tahun 2021Q1-2023Q4 tingkat inklusi keuangan syariah sektor perbankan setiap provinsi di Indonesia memiliki rata-rata 0,1 yaitu termasuk

kategori rendah. Berdasarkan tabel 4.4, nilai rata-rata indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2021Q1-2023Q4 ditemukan 1 provinsi termasuk kategori tinggi, 1 provinsi termasuk medium, dan 31 provinsi lainnya termasuk rendah.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kategori tinggi dalam indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan karena ditunjang oleh dimensi aksesibilitas dan dimensi penggunaan yang tinggi. Dimensi aksesibilitas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kategori tinggi dikarenakan pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga yang relatif stagnan 1,39% tetapi jumlah penduduk yang meningkat sebesar 6% pada tahun 2022. Dimensi penggunaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga termasuk tinggi karena peningkatan nilai PDRB sebesar 10% tetapi dibarengi dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang sebesar 4,20% pada tahun 2022.

Berikutnya menurut tabel data indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2021Q1-2023Q4, kategori medium hanya terdapat 1 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta. Provinsi ini termasuk dalam kategori medium karena ditunjang oleh dimensi penggunaan yang termasuk kategori medium. Kategori medium dimensi penggunaan terjadi karena rata-rata peningkatan jumlah pembiayaan sebesar 15% dan peningkatan nilai PDRB rata-rata sebesar 5.11%.

Dan menurut tabel data indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2021Q1-2023Q4, terdapat 31 provinsi di Indonesia yang termasuk kategori rendah. Provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori paling rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini termasuk kategori paling rendah karena dimensi aksesibilitas, dimensi availabilitas, dan dimensi penggunaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk kategori paling rendah. Dimensi aksesibilitas provinsi ini tergolong rendah karena mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk yang hanya berkisar 1.67% dan peningkatan jumlah dana pihak ketiga hanya berkisar 12%. Dimensi availabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga termasuk rendah dikarenakan dengan perlambatan pertumbuhan penduduk yang hanya berkisar 1.67% dan tidak adanya peningkatan sebaran kantor layanan yaitu hanya 0%.

Secara keseluruhan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2021Q1 – 2023Q4 masih berada dalam kategori rendah. Hasil dari studi ini sejalan dengan penelitian oleh Umar (2017) dan penelitian oleh Puspitasari, Mahri, dan Utami (2020). Ini menunjukkan bahwa berbagai pihak, terutama regulator dan perbankan syariah, masih membutuhkan strategi yang tepat untuk menciptakan

keuangan syariah yang inklusif, di mana akses ke berbagai lembaga, barang, dan jasa keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, masyarakat akan selalu memiliki pengetahuan dan pengelolaan keuangan yang baik.

Studi ini berbeda dengan penelitian Umar (2017) dan penelitian Puspitasari, Mahri, dan Utami (2020), karena hasil olahan data dihubungkan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan pencapaian indeks inklusi keuangan syariah di sektor perbankan Indonesia.

PEMBAHASAN

Perkembangan Dimensi Aksesibilitas Keuangan Syariah Sektor Perbankan di Indonesia

Penelitian mengenai dimensi aksesibilitas indeks inklusi keuangan syariah di sektor perbankan Indonesia pada periode 2021:Q1–2023:Q4 menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks hanya 0,07, yang tergolong rendah. Hal ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah, termasuk infrastruktur pendukung dan literasi keuangan syariah. Meskipun demikian, rata-rata nilai aktual dimensi aksesibilitas mencapai 1,89, dengan kemampuan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.890.000.000 per 1.000 penduduk. Besarnya DPK mencerminkan potensi perbankan syariah, namun aksesibilitasnya masih terbatas pada wilayah atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan inklusi keuangan syariah melalui ekspansi jaringan, layanan digital, dan edukasi masyarakat. Kebijakan inovatif serta kolaborasi antara otoritas keuangan, perbankan syariah, dan pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan akses layanan keuangan syariah secara lebih merata.

Perkembangan Dimensi availabilitas Keuangan Syariah Sektor Perbankan di Indonesia

Dimensi availabilitas inklusi keuangan syariah di sektor perbankan Indonesia selama periode 2021Q1–2023Q4 memiliki rata-rata indeks 0,05, yang tergolong rendah. Indeks ini mencerminkan keterbatasan jumlah cabang, jaringan layanan, serta akses masyarakat terhadap perbankan syariah, terutama di daerah terpencil. Rata-rata nilai availabilitas aktual sebesar 1,05 menunjukkan terdapat satu kantor layanan perbankan syariah per 100.000 penduduk, namun distribusinya masih perlu diperluas. Peningkatan aksesibilitas dapat dilakukan melalui ekspansi cabang dan pemanfaatan

teknologi digital. Dukungan kebijakan dan kolaborasi pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Perkembangan Dimensi penggunaan Keuangan Syariah Sektor Perbankan di Indonesia

Dimensi penggunaan keuangan syariah di sektor perbankan Indonesia pada periode 2021 Q1 hingga 2023 Q4 tergolong rendah, dengan rata-rata indeks 0,13 dan pembiayaan syariah Rp137,7 miliar per kuartal. Rendahnya penggunaan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, aksesibilitas yang terbatas, dan preferensi terhadap produk konvensional. Namun, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menunjukkan indeks penggunaan tinggi sebesar 0,92, dengan rata-rata pembiayaan Rp944,95 miliar per kuartal. Keberhasilan Aceh dikaitkan dengan penerapan syariat Islam yang kuat, regulasi pendukung, serta edukasi keuangan yang baik. Upaya serupa dapat diterapkan di provinsi lain untuk meningkatkan penggunaan keuangan syariah secara nasional.

5. KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan temuan penelitian ini, peningkatan inklusi keuangan syariah di sektor perbankan Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya yang melibatkan kebijakan pemerintah, edukasi masyarakat, inovasi produk perbankan syariah, serta penguatan regulasi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, availabilitas, dan penggunaan keuangan syariah. Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan sistem keuangan syariah yang lebih berkembang dan berdaya saing di masa depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Azizah, A. N., Delviana Saragi, D., Putri, Y., & Tsa, D. (n.d.). *The Effect of Sharia Financial Inclusion on Indonesian Economic Growth*. https://bit.ly/dinamika_ekonomi
- Badan Pusat Statistik. (2024). *STATISTIK INDONESIA 2024 Statistical Yearbook of Indonesia* 2024.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>

- Borhan, N. A., Muda, R., Mohamad, S., Teknologi, U., & Malaysia, M. (n.d.). *Measuring Financial Inclusion in Developing Economies: A Multidimensional Index*. In *Asia-Pacific Management Accounting Journal* (Vol. 16, Issue 3).
- Hakim, I., Rotinsulu, T. O., & Mandeij, D. (2022). *Analisis Tingkat Kesehatan Industri Perbankan Syariah Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Periode 2017-2019*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1).
- Limbanadi, S., Kumaat, R. J., & Mandeij, D. (2023). *Kajian Pencapaian Indeks Inklusi Keuangan Syariah Sektor Perbankan di Indonesia Tahun 2018-2021*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(10), 1-12.
- Maengkom, A. F. K., Rotinsulu, T. O., & Mandeij, D. (2022). *Analisis Pengaruh Suku Bunga Acuan, Kecenderungan Konsumsi Masyarakat Dan Inklusivitas Keuangan Terhadap Permintaan Uang Elektronik Di Indonesia Periode 2011.1-2020.4*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2).
- Mandak, Z. M., Kumaat, R. J., & Mandeij, D. (2023). *Analisis pengaruh jumlah kantor cabang bank, kredit macet dan inklusivitas keuangan terhadap penyaluran kredit UMKM di Provinsi Sulawesi Utara periode 2012Q1-2021Q4*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 1-12.
- Nengsih, N., Ekonomi, F., Islam, B., & Yunus Batusangkar, M. (2023). *STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA* (Vol. 3, Issue 1).
- Nguyen, T. T. H. (2021). *Measuring financial inclusion: a composite FI index for the developing countries*. *Journal of Economics and Development*, 23(1), 77–99. <https://doi.org/10.1108/jed-03-2020-0027>
- Noor Annisa, Y., Sultan Ageng Tirtayasa, U., Setyadi, S., & Arifin, S. (2019). *FAKTOR-FAKTOR PENENTU INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2012-2016* (Vol. 14, Issue 1).
- Oktavia, N. T. (2023). *Strategi Bank Syariah Indonesia Meningkatkan Inklusi Keuangan*. *AL-Muqayyad*, 6(2), 166–174. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1370>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - MARET 2023*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2023.aspx>
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). *Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1).
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Risky Fadilah Afwaja, P., Kumaat, R. J., Mandeij, D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 2000-2019* (Studi empiris Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indoensia). In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 21).
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion-A measure of financial sector inclusiveness*
Index of Financial Inclusion-A measure of financial sector inclusiveness 1.
- Shahzad, F., Khan, A. Q., & Khan, M. Y. (2022). *Measuring Financial Inclusion by Using the Multidimensional Index Approach in Selected Asian Countries*. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 5(4), 481–497.
<https://doi.org/10.47067/ramss.v5i4.263>
- Umar, A. I. (2017). *INDEX OF SYARIAH FINANCIAL INCLUSION IN INDONESIA*. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(1), 99–126.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.726>
- Waworuntu, M., Oldy Rotinsulu, T., Mandeij, D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2017). *Peran Sektor Perbankan Dalam Mengembangkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Indonesia Memasuki Pasar Mea Tahun 2010-2015* *Banking Sector Role In Developing The Competitiveness Of Micro Small And Medium Enterprises (Smes) Indonesia To Enter Market Mea Year 2010-2015*. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 17, Issue 01).